PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGANUT SEDULUR SIKEP DI KABUPATEN KUDUS

Ceprudin

Staf Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Korespondensi: ceprudin.cecep@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah hak setiap individu. Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan termasuk peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan dalam Administrasi Kependudukan (Adminduk) karena mempunyai akibat hukum tertentu. Meskipun pencatatan perkawinan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih ada perkawinan yang belum terlindungi secara hukum. Perkawinan adat penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya perkawinan yang belum bisa dicatatkan dalam administrasi kependudukan. Berdasar analisis penelitian ditemukan bahwa tidak bisa dicatatkannya perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak sipil. Karena itu harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan penganut Sedulur Sikep mendapatkan perlakuan yang sama seperti perkawinan pada umumnya.

Kata-kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Perkawinan; Sedulur Sikep.

Abstract

Marriage is basically the right of every individual. In the organic legislation, marriage is regarded as demographic occurrence that must be recorded in the demographic administration. Registration of marriage is important since it precedes certain legal consequences. Although the registration of marriage is already stipulated in the legislation, there is in fact certain marriages that are not properly covered by legal protection. Marriage performed among the traditional community of Sedulur Sikep in Kudus regency is an example of a marriage that can not be registered in the demographic administration. The analysis of this study revealed that the unfeasibility of registration marriage among members of Sedulur Sikep community in Kudus may end up in denial of their civil rights. Therefore, there must be improvement of legislation governing the registration of marriages so that marriage among Sedulur Sikep community may enjoy equal treatment as any other marriage.

Key Words: Protection; Law; Marriage; Sedulur Sikep.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hak bagi setiap individu yang telah mencapai segala persyaratan.¹ Perkawinan di Indonesia supaya sah secara hukum negara harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kewajiban bagi semua warga Indonesia. Kewajiban ini karena akan berimplikasi pada peristiwa-peristiwa kependudukan². Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan "setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. "

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang sah di Indonesia harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa "perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"³.

Meskipun sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun masih ada realita perkawinan yang masih

dianggap tabu dan tidak sah secara hukum di Indonesia. Perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus adalah fakta yang terjadi di masyarakat. Perkawinan adat Sedulur Sikep kerap mendatangkan kontroversi di masyarakat karena dianggap tidak sesuai secara hukum dan tidak diakui oleh pemerintah.

Masyarakat kerap menganggap perkawinan penganut Sedulur Sikep tidak sah karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk mengurus administrasi perkawinan di Indonesia.⁴ Padahal, pada prinsipnya perkawinan penganut Sedulur Sikep, tak ubahnya seperti prinsip perkawinan pada umumnya. Seperti prinsip pernikahan dalam ajaran agama-agama yang "diakui" negara. Bahkan ajaran Sedulur Sikep mengkritik tajam potret perkawinan dan kehidupan suami istri yang melakukan poligami. Dalam pandangan penganut Sedulur Sikep perkawinan amat penting karena dalam ajarannya itu perkawinan merupakan "jembatan" untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan anak yang mulia.⁵

Sayangnya, pencatatan perkawinannya Sedulur Sikep "terjegal" persyaratan administrasi. Perkawinan warga

¹ Bukanlah semata-mata hanya kebutuhan yang bersifat keduniawian (kebahagiaan atau seksualitas), tetapi juga bersifat ukhrowi yang itu bersifat ubudiyah. Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bulan Bintang 1974) 11.

² Direktorat Jenderal Kepercayaan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Dirjen Kepercayaan 2006) 98.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita 2008) 538.

⁴ Moh. Rosyid, *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal* (Pustaka Pelajar 2008) 212.

⁵ *Ibid.* 110

atau penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (Capil), karena dalam pencatatan perkawinan di KUA hanya untuk penganut Agama Islam dan di Kantor Catatan Sipil hanya untuk penganut lima agama (Non-Muslim) dan Penganut Kepercayaan. Sementara itu warga Sedulur Sikep bukan merupakan bagian dari penganut enam agama juga bukan penganut kepercayaan. Karenanya, menolak jika dicatatkan melalui cara enam agama atau dengan cara kepercayaan.

Oleh karena perkawinan Sedulur Sikep tidak terlindungi undang-undang perkawinan maka penulis memberi judul "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus". Tulisan ini berawal dari penelitian penulis yang dimaksudkan supaya perkawinan penganut Sedulur Sikep dapat terlindungi oleh negara sehingga hak-hak kependudukannya juga terpenuhi.

Agar menghasilkan penelitian dan hasil yang mendalam, peneliti perlu merumuskan dan menspesifikasikan rumusan masalah⁶. Pokok-pokok perumusan masalah tersebut yakni; Pertama, apa pengaturan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia? Kedua, bagaimana prosesi perkawinan adat Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus?

dan Ketiga, bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan supaya melindungi perkawinan adat Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus?

Tujuan penelitian ini yakni; Pertama, untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui prosesi perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus. Ketiga, untuk menjustifikasi bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan harus melindungi perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus.

Dalam penelitian ini, secara filosofis metode penelitian juga merupakan bagian dari kerja kajian filsafat.⁷ Oleh karenanya, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa dikesampingkan. Sebab, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atas hasil proses kerja penelitian.⁸ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologi hukum yang terfokus dalam mengkaji pencatatan perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara (*interview*) secara terbuka dengan responden yaitu ketua adat atau sesepuh Sedulur Sikep. Oleh sebab itu, penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif. Karena, data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan data yang disusun berupa angka-angka.⁹

⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Pustaka Sinar Harapan 1993) 312.

⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rake Sarasin 2002) 5.

⁸ Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Raja Grafindo Persada 2001) 42.

⁹ Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Pustaka Pelajar 2003) 4.

Agar penelitian lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam penelitian, sekiranya dibutuhkan data spesifik yang dapat dipergunakan sebagai sumber penunjang dalam studi lapangan pencatatan perkawinan. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam proses kerja penelitian ini nantinya. Pertama, sumber data primer, yaitu sumber data utama dan paling pokok yang akan diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan penganut Sedulur Sikep. Kedua, sumber data yang bersifat sekunder. Atau dengan kata lain, data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak pengumpul atau oleh pihak peneliti lain. Yakni, buku-buku atau beberapa naskah yang berisi ulasan dan pemaparan mengenai perkawinan warga Seulur Sikep, yang telah dilakukan seorang atau beberapa penulis dan peneliti.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan hanya melindungi pencatatan perkawinan penganut enam "agama resmi" negara dan penganut kepercayaan. Padahal, tidak semua warga negara di Indonesia digolongkan atau dikelompokkan ke dalam enam penganut agama negara dan penganut kepercayaan.

Karena itu, pencatatan perkawinan

penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus tidak bisa dicatatkan karena mereka bukan termasuk penganut "agama resmi" negara juga bukan penganut kepercayaan. Karena itu, pada bagian ini akan terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian perkawinan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan bagi penganut "agama resmi" negara dan penganut kepercayaan.

Perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan nikah, Nikah menurut bahasa arab mempunyai dua arti yaitu arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya daripada nikah ialah *dham* yang berarti meng-himpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasanya ialah *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁰

Dalam bahasa hukum positif perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME).¹¹ Perkawinan merupakan jalan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia.

Perkawinan yang sah (menurut hukum positif) di Indonesia apabila memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai perkawinan. Bagi penganut enam agama, perkawinan diatur dalam

¹⁰ Ali Maqri Al Fayumi, Almisbahu'l Munir, Kairo hlm 295 dan 296 sebagaimana dikutip oleh Kamal Muchtar, *Op.Cit.* 11.

¹¹ Lihat Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, dan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.* 537.

UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Presiden (PP) No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sendiri merupakan tafsir atas UU No. 1 Tahun 1974 dengan tata cara perkawinan khusus bagi yang beragama Islam.¹² Bagi penganut kepercayaan, pencatatan perkawinan diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 37 Tahun 2007.

Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan mengenai perkawinan yang sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Mengenai syarat sahnya perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 Ayat (1) ditentukan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat (2) menentukan "bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Mengenai teknis pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.¹⁵ Pada bab pencatatan perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Ayat (2) menentukan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Ayat (3) menentukan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan setiap orang yang akan melangsungkan per-

¹² Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin* (Idea Press 2009) 46.

¹³ Pertimbangan dari Pasal di atas adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.* 538.

¹⁵ Dalam KHI Pasal 4 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi memang KHI disini sedang memposisikan peraturan ini hanya untuk pemeluk agama Islam. Sehingga bahasa yang dipakai dalam KHI juga sangat kental dengan fiqh Islam.

kawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ayat (2) menentukan pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat (3) menentukan pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Lebih lanjut mengenai syaratnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang mengatakan pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Ayat (2) menentukan selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula: kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menentukan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan menentukan;

1. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
2. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), (3),

(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.....¹⁶

Selanjutnya tentang pencatatan dalam suatu perkawinan di Indonesia merupakan syarat sahnya perkawinan dari perspektif negara (bukan agama). Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pencatatan perkawinan penganut kepercayaan diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁷ Dalam Pasal 34 ayat (1) menentukan UU *a quo* ditegaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Berkenaan dengan tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam bab persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Pasal 81 ayat (1) menentukan perkawinan Penghayat Kepercayaan dila-

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

¹⁷ Harun Nur Rosyid, dkk, *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat Jakarta; Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan* (Kementerian dan Kebudayaan Pariwisata 2004) 27. Lihat juga UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

kukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.¹⁸ Ayat (2) menentukan pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan. Ayat (3) menentukan pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa".¹⁹

Selanjutnya dalam Pasal 82 menentukan bahwa peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan: Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan; Fotokopi KTP; Pas foto suami dan istri; Akta kelahiran; dan Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.²⁰ Pada ayat (2) diatur bahwa yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam Pasal 83 ayat (1) menentukan "pejabat instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:

- a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
- c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.²¹

Selanjutnya ayat (2) menentukan "kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri".²²

Penjelasan di atas menegaskan bahwa perkawinan penganut Sedulur Sikep tidak terlindungi oleh hukum. UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur perkawinan penganut enam "agama resmi" negara. Begitu juga dengan UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 37 Tahun 2007 hanya mengatur pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan. Sementara penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus sudah menegaskan, mereka bukan penganut enam "agama resmi" negara juga bukan penganut kepercayaan. Sehingga pencatatan perkawinan

¹⁸ Abdul Mutholib Ilyas, Abdul Ghofur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia* (Amin 1998) 12.

¹⁹ *Ibid.* 13.

²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Op.Cit.* 47.

²¹ *Ibid.*

²² Harun Nur Rosyid, dkk, *Op.Cit.* 29.

Penganut Sedulur Sikep tidak bisa dicatatkan dengan tata cara penganut "agama resmi" negara maupun dengan tata cara penganut kepercayaan.

Perkawinan Adat Penganut Sedulur Sikep di Kudus

Perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus sejatinya memiliki hakikat tujuan yang sama dengan perkawinan kelompok keagamaan yang lain. Meskipun dari sisi ritual ada sedikit perbedaan dengan prosesi perkawinan penganut agama dan penganut kepercayaan, namun dari sisi tujuannya tidak ada perbedaan. Karena itu, peraturan perundang-undangan harus mengakomodir atau melindungi perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus.

Sedulur Sikep merupakan ajaran yang di Indonesia lebih dikenal dengan ajaran Samin (Saminisme). Ajaran Sedulur Sikep mula-mula diajarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914). Ajaran pokok Sedulur Sikep pada mulanya merupakan konsep penolakan terhadap budaya Kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia.

Pada 1890 pergerakan Sedulur Sikep berkembang di dua desa hutan kawasan Randublatung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Gerakan Sedulur Sikep di Jawa Tengah mulanya berkembang di dua daerah yaitu Blora dan Pati. Selain di dua daerah tersebut, di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, juga terdapat penganut Sedulur Sikep.

Dalam ajaran Sedulur Sikep dikenal dengan enam prinsip dasar etika yaitu: *pantangan* (larangan) *drengki*, *srei*, *panasten*, *dahwen*, *kemeran*, dan *nyiyi marang sepodo*. Penganut Sedulur Sikep mempunyai falsafah *bejok reyot iku dulture, waton menungso tur gelem di daku sedulur*. Ada lima hal lain lagi yang tidak boleh dilakukan yaitu: *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil* (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dalam sumber kehidupannya), *jumput* (mengambil barang yang jadi komoditas di pasar), *nemu wae ora kena* (menemukan barang milik orang lain, tidak boleh diambil/harus dikembalikan kepada si empunya).

Sementara itu, hal-hal yang harus di-*ugemi* dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam prinsip: *kudu weruh the-e dhewe* (tahu barang miliknya dan yang bukan miliknya), *Lugu* (komitmen tegas kalau berjanji, kalau bisa katakan bisa kalau tidak katakan tidak), *Mligi* (taat pada aturan yang berupa prinsip beretika dan prinsip berinteraksi) dan Rukun dengan isteri, anak, orangtua, tetangga dan siapa saja.

Dalam ajaran Sedulur Sikep, proses perkawinan seorang pengantin laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian: "Sejak Nabi Adam, pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama..... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua."

Ajaran kepercayaan yang diajarkan Sedulur Sikep Surosentiko pada pe-

ngikutnya yang sampai sekarang masih dipatuhi warga Sedulur Sikep. Menurut orang Sedulur Sikep perkawinan dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Ajaran perihal perkawinan dalam tembang *Pangkur* orang Sedulur Sikep adalah sebagai berikut:

"Saha malih dadya garan, (maka yang dijadikan pedoman),
 Anggegulang gelunganing pembudi,
 (untuk melatih budi yang ditata),
 Palakrama nguwoh mangun, (pernikahan yang menghasilkan bentuk),
 Memangun traping widya, (membangun penerapan ilmu),
 Kasampar kasandhung dugi prayogântuk, (terserempet, tersandung sampai kebajikan yang dicapai),
 Ambudya atmaja 'tama, (bercita-cita menjadi anak yang mulia),
 Mugi-mugi dadi kanthi." (mudah-mudahan menjadi tuntunan).²³

Prinsip pernikahan Sedulur Sikep anak (calon mempelai) laki-laki/perempuan mempunyai orang tua. Orang tua dari calon mempelai perempuan, ibu berkewajiban merukunkan anak dan bapak menyetujui perkawinan. Jika tidak ada bapak, bisa diwakili oleh kakak dari bapak (*pak de*) atau adik dari bapak (*pak lek*).²⁴

Penelitian Moch Rosyid mencatat lima tahapan perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kudus²⁵ adalah:

1. *Nyumu'* yaitu kedatangan keluarga (calon) penganten putra ke keluarga (calon) penganten putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*).
2. *Ngendek* yaitu pernyataan calon besan dari keluarga penganten putri untuk menindaklanjuti prosesi *nyumu'*. Pelaksanaan *ngendek* diawali dengan pernyataan calon penganten putra kepada bapak-ibunya (di rumahnya sendiri) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putri. Dalam prosesi *ngendek* calon penganten putra tidak ikut (menghadiri) di rumah calon penganten putri.
3. *Nyuwito-ngawulo* yaitu hari dilangsungkannya perkawinan niat penganten putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati*, *titine* anak adam). Dalam proses ini penganten putra hidup bersama keluarga pengantin putri dalam satu rumah (*ngawulo*) atau pengantin putri hidup bersama keluarga pengantin putra, berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Dalam proses *nyuwito* pada dasarnya untuk mencari kecocokan calon pengantin dengan hidup bersama di tempat calon mertuanya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses *nyuwito* tidak ditentukan.
4. *Paseksen* merupakan forum ungkapan penganten putra di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri penganten putri, keluarga, dan tamu undangan baik dari warga Sedulur Sikep maupun non Sedulur Sikep. Acara tersebut setelah kedua calon penganten melangsungkan hubungan suami-istri (kumpul) dalam proses *nyuwito* tersebut. Proses *paseksen* ini merupakan proses "resepsi" pernikahan.

²³ *Ibid.*

²⁴ Moh Rosyid, M.Pd, *Op. Cit.* 97.

²⁵ *Ibid.* 97-105

kahan atau "walimatul 'ursy" dalam masyarakat non Sedulur Sikep (atau umat Islam).

5. *Tingkep* setelah pengantin hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan prosesi selamat bayi dalam kandungan yang disebut *brokohan* (selamatan).

Pelaksanaan perkawinan juga ada *ijab qobul* berupa ungkapan "*tanggung jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase*", maksudnya ungkapan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan di hadapan bapak ibunya.²⁶ Dalam proses perkawinan Sedulur Sikep, usia mempelai tidak memiliki batas minimal. Hal ini didasarkan pada argumentasi; a) manusia lahir dalam kondisi tidak memiliki usia, b) standar dilangsungkannya prosesi perkawinan adalah ketika mereka senang dan siap untuk menikah (usia adam brahi)²⁷, dan c) dalam pembicaraan tentang angka, tanggal, dan tahun mengingat warga Sedulur Sikep mentradisikan budaya lisan, maka bagi generasi tua tidak bisa memberikan jawaban secara jelas.²⁸

Prinsip perkawinan masyarakat Sedulur Sikep dianggap sah bila telah dilaksanakan oleh orang tua, bukan dengan pencatatan administrasi oleh pemerintah (KUA atau Catatan Sipil). Ketika terjadi perceraian, suami menyerahkan istri kepada mertuanya karena

ketika perkawinan mendapatkan persetujuan mertua, sehingga jika terjadi perceraian di serahkan kepada mertua. Pembagian harta dari hasil perkawinan (gono-gini) maupun harta bawaan diputuskan bersama antara suami dan istri.²⁹

Pada perkawinan Sedulur Sikep ini juga terdapat larangan kawin. Larangan kawin ini diperuntukkan bagi saudara kandung, perkawinan sejenis, dan beristri lebih dari satu.³⁰ Poligami dianggap penyebab terjadinya konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi dan dipantang adanya praktik poligami.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa sejatinya perkawinan penganut Sedulur Sikep sama dengan perkawinan penganut "agama resmi" negara dan penganut kepercayaan. Meskipun dari sisi ritual terdapat perbedaan, namun pada hakikatnya sama, tujuan perkawinan untuk melanggengkan keturunan dengan dasar kebahagiaan. Bahkan, prinsip perkawinan Sedulur Sikep lebih tegas dimana melarang adanya poligami.

Pengaturan Pencatatan Perkawinan Tidak Melindungi Perkawinan Penganut Sedulur Sikep

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia tidak melindungi perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus.

²⁶ Moh Rosyid, *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal* (Pustaka Pelajar 2008) 182.

²⁷ Strata usia masyarakat Samin terbagi menjadi, a) Adam timur (generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki "rasa" dengan lawan jenis). b) Adam brahi (generasi Samin yang sudah dewasa dan memiliki "rasa" terhadap lawan jenis. c) Wong sikep kukuh wali adam (orang Samin yang telah berkeluarga). Moh Rosyid, M.Pd., *Nihilisme Peran Negara*, Op. Cit. 113.

²⁸ Moh Rosyid, *Samin Kudus*, Op. Cit. 183.

²⁹ Moh Rosyid, *Nihilisme Peran Negara*, Op. Cit. 112.

³⁰ *Ibid.*

Perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus tidak terlindungi karena pengaturan yang ada di Indonesia hanya mengatur perkawinan penganut enam "agama resmi" negara dan penganut kepercayaan. Padahal, penganut Sedulur Sikep enggan dicatatkan dengan cara agama "resmi negara" dan juga kepercayaan. Mereka mau dicatatkan jika sesuai dengan tata cara Sedulur Sikep atau perkawinan adat lokal. Karena itu, pengaturan tentang perkawinan harus diperbaiki atau direvisi. Rekomendasi untuk perbaikan tersebut, adalah:

Pertama, Pengakuan Sedulur Sikep Menjadi Agama Lokal di Indonesia. Adanya ide perbaikan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia berangkat dari sikap penganut Sedulur Sikep yang menegaskan bahwa mereka bukan penganut kepercayaan juga bukan penganut "agama resmi" negara. Mereka adalah penganut Agama Adam atau kepercayaan adat Sedulur Sikep. Sehingga itu mereka enggan didaftarkan sebagai organisasi kepercayaan yang selama ini terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Lingkungan Masyarakat (Kesbangpolimnas). Mereka ingin terdaftar di pemerintahan dengan catatan sebagai organisasi agama, layaknya enam agama yang diakui pemerintah.

Karena tidak bisa dicatatkan, akibatnya mereka dalam setiap layanan

administrasi publik selalu mendapat diskriminasi. Paling utama adalah tidak bisa mencatatkan perkawinan karena tidak ada aturan secara rinci untuk melakukan pencatatan."³¹ Selama ini dalam masalah pencatatan perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Bagi yang beragama Islam, untuk mencatatkan perkawinan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk non-Muslim dan penganut kepercayaan dicatatkan di Catatan Sipil. Untuk Sedulur Sikep, akhirnya tidak bisa dicatatkan karena tidak menganut agama atau aliran kepercayaan.³² Akibatnya, pasangan perkawinan penganut Sedulur Sikep tidak mendapat akta nikah atau surat nikah dari pemerintah. Inilah pangkal persoalan pencatatan Administrasi Kependudukan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus.

Kedua, Identitas Kependudukan Bermasalah Akibat Tidak Bisa Mencatatkan Perkawinan. Penganut Sedulur Sikep Kudus menghendaki kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditulis Agama Adam. Permintaan itu berdasarkan keyakinan yang mereka anut, yakni Agama Adam. Sesebuah penganut Sedulur Sikep Kudus Budi Santoso menegaskan, mereka ingin tak ada perbedaan dalam pengisian kolom

³¹ Wawancara dengan salah satu pengikut Sedulur Sikep Kudus, Muqshid, pada 25 Desember 2015.

³² Wawancara dengan Budi Santoso, 25 Desember 2015. Ia dengan sangat jujur mau mencatatkan perkawinan asalkan berdasarkan keyakinan Sedulur Sikep. Namun ini seakan menjadi berat, karena untuk bisa mencatatkan perkawinan sesuai dengan Agama Adam, maka syaratnya adalah pertama-tama Agama Adam harus diakui oleh negara.

agama dalam KTP. Menurutnnya, sama-sama warga negara Indonesia, harus diperlakukan sama oleh pemerintah. tanpa membeda-bedakan.³³

1. Pembuatan Akta Kelahiran

Imbas perkawinan yang tak bisa dicatatkan, akta kelahiran anak-anak Sedulur Sikep penisbatan orang tuanya (bin) akhirnya kepada ibunya. Karena tidak bisa melampirkan akta nikah (surat kawin) ketika membuat akta kelahiran, maka anak Sedulur Sikep dianggap tak mempunyai ayah oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Akhirnya penisbatannya kepada seorang ibu, bukan kepada bapak. Dalam akta kelahiran anak-anak Sedulur Sikep ditulis "telah lahir anak luar kawin dari."

Pada umumnya dalam akta kelahiran anak ditulis "telah lahir anak dari pasangan suami-isteri". "Selain soal pendidikan agama di sekolah, kami juga mengalami diskriminasi soal pencatatan akta kelahiran anak yang tertera "anak luar kawin dan bin-nya harus kepada ibunya. Ini sangat menyakitkan bagi kami".³⁴

Salah satu orang tua Sedulur Sikep Budi Santoso, menunjukkan kutipan akta kelahiran anaknya. Dalam akta kelahiran itu tertulis "telah lahir Sarah Puji Rahayu anak ke satu, perempuan "luar kawin dari Tianah". Padahal Tianah merupakan Istri dari Budi Santoso. Sementara dalam kutipan

akta kelahiran yang "beragama resmi" terkait dengan orang tua anak, jelas disebutkan bapak dan ibunya. Akta kelahiran anak dari pasangan suami istri yang perkawinannya dicatatkan pemerintah lazimnya ditulis "telah lahir anak laki-laki (nama anak) dari suami-isteri (nama suami dan ayah.)".

"Masalah yang kami hadapi sangat banyak terkait pelayanan dari pemerintah. Ketika kami melakukan tuntutan untuk diberikan pelayanan yang sama dengan warga lain, para pejabat itu ngomongnya aturannya (undang-undang) nggak ada," ujar Maskad dengan menggunakan bahasa Jawa kromo. Dengan status seperti ini, anak-anak Sedulur Sikep kerap dianggap anak haram. Stigma negatif ini karena dalam akta kelahiran ada kata-kata anak luar kawin.

2. Pembuatan Kartu Keluarga

Dalam Kartu Keluarga (KK) Sedulur Sikep Kudus kepala keluarga tertera seorang ibu. Ayah sama sekali tak mempunyai peran. Ini merupakan imbas dari perkawinan yang tidak bisa dicatatkan. Akhirnya, ketika membuat kartu keluarga mereka tak bisa melampirkan akta nikah. Akibat tidak bisa melampirkan akta nikah, maka dalam KK ditulis yang menjadi kepala keluarga adalah ibunya.

"Kami memohon kepada pemerintah supaya ada solusinya. Dalam

³³ Wawancara dengan Budi Santoso 11 Desember 2015. Jika yang dimaksud oleh Mendagri kosong, maka kami ingin semua KTP dikosongkan. Termasuk KTP semua penganut agama. Jangan ada yang dikosongkan, dan diberi identitas agama.

³⁴ Wawancara dengan Maskad, 25 Desember 2015.

kartu keluarga kami yang ditulis sebagai kepala keluarga adalah ibunya, bukan bapaknya. Padahal bapaknya ya ada.³⁵ Semua orang mengetahui kalau kami bapak dari anak-anak. Wong kami ketika menikah mengundang semua orang, sekeliling kami. Jadi mereka tahu kalau anak-anak kami kepala keluarganya ayahnya, dan ada."

Akibat kepala keluarga seorang ibu mempunyai dampak yang sangat besar. Bukan hanya stigma soal menikah yang tidak sah, namun ternyata ada dampak yang lebih beragam terhadap perekonomian. "Ancaman ekonomi itu berupa penolakan oleh bank ketika akan meminjam uang. Ketika kami mencoba untuk meminjam uang ke Lembaga Keuangan dan ke bank ternyata tidak bisa. Alasannya kepala keluarganya perempuan".³⁶

Ternyata, karena dalam kartu keluarga yang menjadi kepala keluarga seorang ibu, mereka tak bisa meminjam uang. "Kami mengajukan pinjaman ke salah satu bank dan juga ke BPR, namun kami tak bisa meminjam uang karena kartu keluarga kami, kepala keluarganya ibu, bukan bapak. Kami menjadi semakin tertindas. Penderitaan kami lengkap.

Padahal kami meminjam uang untuk modal pertanian. Ketika nanti kami membayar jelas, maka hasil panen atau misalnya harus mencicil kami ada. Apa karena kami orang Sedulur Sikep, terus dianggap tidak mampu membayar utang," terang Maskad, kecewa.³⁷

3. Perbaikan Pengaturan Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Problem pencatatan perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus bermula karena adanya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan "perkawinan yang sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Secara tekstual, ayat ini hanya melegalkan perkawinan warga negara yang menganut agama "resmi negara" dan menganut kepercayaan.

Ayat di atas tidak memberi ruang bagi warga negara yang tidak menganut agama juga tidak menganut kepercayaan seperti penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus.³⁸ Secara tersirat, dengan adanya ayat ini maka perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus tidak sah. Padahal secara substansi perkawinan penganut Sedulur Sikep sama dengan

³⁵ Wawancara dengan Muqshid, 25 Desember 2015. Muqshid merupakan pengikut ajaran Sedulur Sikep dari Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus.

³⁶ Wawancara dengan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus, Tianah, pada 25 Desember 2015

³⁷ Mereka sangat terpuak dengan penolakan meminjam uang ini. Mereka nyaris tak sempurna dalam semua bentuk diskriminasi. Wawancara dengan Maskad, 25 Desember 2016.

³⁸ Sebagai informasi, kelompok kepercayaan yang tidak menganut agama juga tidak menganut kepercayaan bukan hanya penganut Sedulur Sikep. Di beberapa daerah terutama di Indonesia Timur banyak kelompok kepercayaan yang tidak menganut agama juga tidak menganut kepercayaan

perkawinan penganut agama dan kepercayaan. Supaya perkawinan penganut Sedulur Sikep terlindungi oleh ayat di atas penting untuk menambahkan klausula "agama lokal di Indonesia". Hal itu karena penganut Sedulur Sikep tidak menolak jika "dikategorikan" agama lokal.

Sebagai konsekuensi ada penambahan klausula pada ayat di atas, maka Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan" juga harus diperbaiki. Perbaikan pada ayat ini juga harus ditambahkan klausula "agama dan kepercayaan serta penganut agama lokal".

Dengan itu, maka perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus terlindungi. Dengan adanya penambahan klausula pada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan harus menyesuaikan dengan memasukkan klausula «perkawinan penganut agama lokal». Hal ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga

harus mengakomodir atau melindungi pencatatan perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus. PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU No 24 Tahun 2013 tentang Adminduk yang mengatur secara spesifik tentang pencatatan perkawinan penganut kepercayaan harus diperbaiki sehingga penganut agama-agama lokal perkawinannya bisa dicatatkan.

PENUTUP

Dari beberapa uraian di atas kiranya ada beberapa hal penting yang bisa disimpulkan, yaitu:

1. Penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus bukan penganut «agama resmi» negara, juga bukan penganut kepercayaan. Karena itu, pencatatan administrasi kependudukan penganut Sedulur Sikep tidak bisa diakomodir.
2. Perkawinan Penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus tidak bisa dicatatkan di pemerintah dengan alasan tidak ada payung hukumnya. Padahal perkawinan penganut Sedulur Sikep pada hakikatnya sama dengan perkawinan penganut agama dan penganut kepercayaan.
3. Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia harus diperbaiki supaya perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus dapat dilindungi.

Oleh karenanya berikut disampaikan beberapa saran sebagai pokok pikiran:

1. Pemerintah harus memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan memasukkan klausula “agama lokal”. Sehingga pencatatan perkawinan penganut agama lokal atau warga negara yang tidak menganut agama dan kepercayaan bisa dicatatkan.
2. Pemerintah harus merumuskan kembali bagaimana pencatatan Adminduk secara umum bagi warga negara yang tidak menganut agama juga tidak menganut kepercayaan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ilyas, Abdul, Mutholib, *Abdul Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia* (Surabaya; Amin, 1998)
- Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, cet.1 1974).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).
- Mungin, Burhan (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Rosyid, Harun Nur, dkk, *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat Jakarta; Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, Kementerian dan Kebudayaan Pariwisata, 2004.*
- Rosyid, Moh., *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin* (Yogyakarta: Idea Press, cet1. 2009).
- Rosyid, Moh., *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Shodiq, Muhammad dan Muttaqien, Imam, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terj. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet-10, 2008).
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

Dokumen lain

- Direktorat Jenderal Kepercayaan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cet.2 tahun 2006.